

## Poskolonial dan Developmentalisme: Telaah Kritis

*M. Faishal Aminuddin*

Universitas Brawijaya

### ABSTRACT

The relation between postcolonial theory and developmentalism does not run linearly, but there is a contradictory dialogue space. This article aims to explain the rejection of postcolonial theory to the paradigm and practice of developmentalism through an evaluation of debates in the philosophical realm. This article answers the debates in postcolonial studies, including the theorizing of political economy, development, and international politics. This rejection stems from the fact that developmentalism is considered a new form of colonization in the economic aspect, extending to social, political, and cultural aspects. The results show that the opposition of postcolonial theory to developmentalism can be explained through four discussions as the unit of analysis, which consists of the international trade system, capital distribution schemes, the role of global institutions, and the existence of the state and its people.

Keywords: postcolonialism, developmentalism, international politics, critics

### ABSTRAK

Relasi di antara teori poskolonial dan developmentalisme tidak berjalan secara linear, melainkan terdapat ruang dialog di dalamnya yang saling bertentangan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penolakan teori poskolonial terhadap paradigma dan praktik developmentalisme melalui evaluasi perdebatan dalam ranah filosofis. Artikel ini menjawab perdebatan dalam studi poskolonial yang mencakup tentang teorisasi ekonomi politik, pembangunan, dan politik internasional. Penolakan tersebut bersumber dari fakta bahwa developmentalisme dianggap sebagai bentuk kolonisasi baru dalam aspek ekonomi yang kemudian meluas pada aspek sosial, politik, dan budaya. Hasil menunjukkan bahwa pertentangan teori poskolonial terhadap developmentalisme dapat dijelaskan melalui empat sektor pembahasan sebagai unit analisis, yaitu terdiri dari sistem perdagangan internasional, skema pendistribusi modal, peranan institusi global, serta keberadaan negara dan masyarakatnya.

Kata kunci: poskolonial, developmentalisme, politik internasional, kritik

### A. PENDAHULUAN

Teori developmentalisme, begitu berjaya sejak akhir perang dunia kedua sehingga mampu meletakkan dasar episentrum baru sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi sampai peradaban. Dari developmentalisme klasik yang mewakili ekonomi Keynesian sampai teorisasi barunya yang disebut “New-Developmentalism” (Bresser-Pereira, 2016). Rumus pembangunan mereka, kemudian menjadi resep mujarab yang disasarkan pada obyek negara-negara yang baru merdeka. Perkembangan material yang menakjubkan telah dicapai oleh negara-negara ini meskipun tetap dalam kendali dan ketundukan pada negara-negara maju. Terminologi “pembangunan” sendiri telah sedemikian rupa menjadi panduan wajib

dimana tidak ada pilihan lain jika ingin masuk dalam konstruksi yang bernama kemajuan. Semuanya disiapkan mulai dari infrastruktur untuk menempuh jalan tersebut bersamaan dengan panduan instruktur dan para teorisnya dari dunia pertama.

Selanjutnya, developmentalisme, memang tidak lagi menjadi teori belaka yang dicatatkan didalam papan tulis dan memori para kepala negara dunia ketiga. Namun telah menjadi madzhab, aliran dan keyakinan baru yang mengusung janji kemajuan dan keberadaban negara-negara dunia ketiga yang pada akhirnya diharapkan kelak bisa naik kelas dan sejajar dengan negara kelas pertama. Pada paruh kedua dekade 80-an, developmentalisme mengalami tantangan cukup serius. Dalam ranah teoretik, perdebatan dimulai dengan mempertanyakan kemujaraban resep yang diberikan negara dunia pertama karena janji yang diberikan untuk sejajar tidak kunjung datang (Dirlik, 2014; Howe & Park, 2015). Diskusi tentang poskolonial dan developmentalisme sudah muncul dalam beberapa topik seperti klientisme politik dalam developmentalisme (Lande, 2012), nasionalisme dalam developmentalisme di Afrika dan Asia (Chachage, 2004; Skinner, 2011; Bhattacharya, (Ed.), 2019; Lee, 2005).

Artikel ini berangkat dari perdebatan didalam teorisasi poskolonial mengenai moda produksi yang secara rinci dijelaskan sebagai salah satu pembentuk kesadaran kelas. Diantara sekian banyak modalitas permanen yang menjadikan beberapa wilayah negara atau kawasan yang pernah mengalami nasib sebagai negara koloni, moda produksi mampu menunjukkan arah kritik poskolonial terhadap konsepsi developmentalisme. Tujuan yang hendak dicapai dari ulasan dan evaluasi perdebatan dalam ranah filosofis ini adalah penjelasan yang memadai tentang bagaimana teori poskolonial menolak developmentalisme? Pertanyaan kunci ini belum banyak dijelaskan oleh literatur di dalam teori poskolonial sendiri atau dalam studi pembangunan dalam konteks nasional dan politik internasional. Meskipun penting disinggung disini bahwa kemungkinan pertemuan antara teori poskolonial dan studi pembangunan mempunyai maksud tertentu. Salah satu diantaranya adalah dialog baru diantara keduanya (Sharp & Briggs; 2006).

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Klaim Teori Poskolonial**

Teori poskolonial pada awalnya berkembang di dunia sastra yang terilhami oleh ilmu sosial dimana perangkat keilmuan tersebut dimanfaatkan untuk meninjau ulang konstruksi pengetahuan dan wacana yang ada dalam relasi kehidupan. Obyek yang dilihat terpecah dalam berbagai kategorisasi semisal geografis, suku, agama dan kesadaran. Tetapi aspek utama adalah perbedaan (*difference*) yang memunculkan dua kutub yang saling beroposisi di antara "ruang" satu dengan lainnya. Ruang ini dimanifestasikan sebagai katarsis yang menjadi penting untuk dipertanyakan eksistensinya karena menyebabkan keterpisahan narasi dua dunia dalam kondisi yang tidak sejajar.

Pejelasan utama dari pemikiran awal poskolonial menekankan pada klaim bahwa kekuasaan atau pengetahuan merupakan imperialisme itu sendiri. Edward Said misalnya, dia menawarkan kritik dekonstruktif untuk menolak perbedaan. Demarkasi antara dua dunia dalam kacamata Said terbagi atas *imaginative geography*, menunjuk pada batasan imajiner atas hegemonisasi dan tindakan koersif dalam rangka penguasaan satu ruang atas lainnya sehingga muncul apa yang disebut sebagai *dramatic boundaries* yang menekankan kesulitan

mendasar bagi seseorang dengan latar belakang tertentu untuk mengkonseptualisasikan eksistensi dirinya (Said, 1982; 1983).

Pemikir poskolonial lainnya, Gayatri Spivak mencoba menerangkan titik balik perbedaan sebagai proses yang berjalan terus menerus. Demikian halnya dengan resistensi sebagai penangkal dari proses dominasi, juga harus berjalan seiring. Dia menambahkan dengan perlunya melakukan *subjectivity of sub-altern subjects* (Spivak, 1999). Gerakan subyek untuk melihat dirinya sendiri sebagai subyek harus dilakukan oleh kelas *sub-altern*, yang diterjemahkan sebagai kelas yang selama ini terabaikan, tidak bersuara dan tidak mempunyai kesadaran sejarah secara mandiri. Perdebatan mengenai siapa yang berhak menjadi wakil atau merasakan ada keterwakilan kolektif yang menyurakan kepentingan bersama diketengahkan bersamaan dengan obyektifikasi teoretik yang mendukung bahwa poskol bukan hanya memandang subyek sebagai obyek yang diam karena proses hegemonis tetap akan dilanjutkan dalam proyek- proyek ambisius dari pemilik otoritas sebelumnya.

Mengenai adanya hegemoni atau kolonisasi terhadap *sub-altern*, pada akhirnya identik dengan konsepsi atas tanda. Homi Bhaba melihat munculnya identitas hibrida sebagai salah satu penanda penting adanya perbedaan dimana satu eksistensi bernaung dibawah hegemoni eksistensi lainnya sementara eksistensi yang ternaungi tidak mempunyai kapasitas yang sama. Dia menyebut ada dua macam hibridasi yang pertama bersifat kultural dan kedua politik (Bhabha, 1994). Baik kultural dan politik sama- sama mempunyai efek samping pada konstruksi dan narasi peradaban. Kolonialisme ditudingnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab meskipun dia tidak menyalahkan sepenuhnya atas apa yang diwariskan oleh kolonialisme pada bangsa India karena bagaimanapun proses kolonisasi telah mewariskan dua hal penting yakni orang India memahami moda produksi barat dan bisa menjadi administrator bagi bangsanya sendiri (Bhabha, 1990; 2003). Aspek buruknya, kolonialisme menciptakan trauma atas penghisapan besar-besaran atas sumber daya ekonomi dan menimbun lokalitas dalam kuburan yang paling dalam karena tidak diberikan kesempatan untuk eksis.

Oleh sebab diatas, narasi perlawanan harus dibuat sebagai bagian dari usaha nyata untuk menulis ulang sejarah dari perspektif pihak terkoloni dan melakukan penolakan pemusatan produksi pengetahuan akademis seperti yang selama ini terjadi. Tidak banyak kesempatan yang didapat untuk mempelajari bangsa sendiri dengan kesadaran konstruksi orang lain. Faktor utamanya adalah parameter keilmiah yang menjadi standar tetap belum bisa bergerak dari wilayah konstruksi keilmiah yang dijadikan standar di barat (Guha, 1994; 2010). Dalam perkembangan selanjutnya, para teoretisi membutuhkan penanda dan hal itu terletak pada terma-terma penting seperti sejarah, agensi, keterwakilan, identitas dan wacana. Hampir semua pemikir poskolonial yang lebih detail beranjak dari terma diatas (Alexander & Mohanty, 1997; Jayaweera 1999; Rajan & Mohran, 1995; Rizvi & Walsh 1998). Semuanya mengembangkan karakteristik reposisi narasi wilayah poskolonial dan menakar konsep perbedaan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk melakukan narasi perlawanan. Meskipun tidak tampak ada usaha untuk menjadikan poskolonialisme sebagai bagian dari perlawanan frontal, paling tidak hampir semua pemikir dan teoretisnya menyekapati bentuk peninjauan ulang, reposisi dan penelusuran untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar dimiliki oleh subyek yang ternarasikan.

Klaim “poskolonial” merujuk pada gagasan yang dibawa oleh fenomena dalam filsafat yang termaktub dalam posstrukturalis, posmodern, pospositivis dan lainnya. Semua peminat dan pemikirnya telah menjejak landasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa acuan filosofis ini berjalan di atas reposisi, redefinisi dan peninjauan ulang atas narasi besar modernitas, developmentalisme dan liberalisme berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan distribusi kekuasaan, ekonomi dan budaya. Jika ditelusuri, dalam studi yang dilakukan oleh Chakrabarty (1992), Mohanty (1991) dan Spivak (1990) diperoleh penjelasan yang lebih memadai tentang makna awalan (*prefix*) “pos”,- post untuk menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan setelah rezim resmi kolonial. Mereka semua mencurigai bahwa awalan tersebut ternyata tetap berpretensi untuk melanjutkan bentuk kolonialisme lain yakni wacana. Ini sangat mungkin sekali karena akar gagasan “pos” berawal dari pemikir barat. Tetapi yang paling penting dari teori poskolonial adalah pembagian ranah kerja mengetengahkan tiga ranah preferensi teori poskol yaitu deskripsi literal dari kondisi di bekas masyarakat jajahan, deskripsi kondisi global setelah periode kolonialisme dan deskripsi wacana yang dibawa oleh orientasi epistemologis tertentu (Dirlik, 1994; Slemon, 1990).

Klaim teori poskolonial bergerak dari penjelasan konsep perbedaan yang berarti pembagian dua hal yang beroposisi. Kemudian menyatakan bahwa antara identitas dan perbedaan saling berdialektika dalam penciptaan nilai dan makna. Resistensi sebagai strategi penolakan atas konstruksi identitas dan perbedaan oleh kekuasaan bisa dilakukan karena resistensi bukan hanya persoalan yang diakibatkan oleh struktur asimetris dari adanya dominasi saja melainkan melanjutkan hubungan kekuasaan yang stagnan dalam bentuk kekuasaan tersebut. Tingkat dan kadar resistensi masih dipilah lagi menjadi sesuatu yang cenderung dimaknai sebagai subversi, oposisi atau mimikri dan identitas hibrida yang diartikan sebagai integrasi. Berangkat dari klaim tersebut, Sharp dan Briggs sampai pada pernyataan bahwa konseptualisasi poskolonial dapat menawarkan perangkat yang kuat dan menantang konsep developmentalisme. Utamanya terhadap kata kunci pemberdayaan sebagai langkah awal yang penting. Mereka juga mengelaborasi persoalan keterwakilan (*representasi*) yang problematik. Meskipun keduanya masih dilanda kebingungan untuk menghubungkan kapasitas studi pembangunan dengan teori poskolonial, paling tidak keduanya menyimpulkan ada keterkaitan yang terbungkus dalam penegasian, pengasosiasian, dan dialog. Dalam memfokuskan bahasan ini, saya mengambil pendapat dari Christine Sylvester (1999). Menurutnya, studi developmentalisme bukan dimaksudkan untuk mendengar apa yang hendak dikatakan oleh *sub-altern* dan studi postkol juga bukan bertujuan untuk memberikan perhatian pada dirinya sendiri sementara *sub-altern* masih merasa kekurangan.

### **Dialog atau Penolakan?**

Artikel ini ingin membuktikan terlebih dahulu sejauh mana studi poskolonial dan developmentalisme sama-sama membuka diri untuk berdialog? Dan apa yang hendak dibawa dalam dialog tersebut? Premis penolakan dari poskolonial atas developmentalisme sudah bisa terbaca dalam klaim yang mereka tawarkan, tetapi dalam hal hibridasi, ada kemungkinan bagi terbukanya pintu dialog karena proses hibridasi membawa konsekuensi pembelajaran, sebuah citra yang dicita-citakan sebagai yang hendak dibangun di atas ketidakpercayaan pada eksistensi awal. Kelak, hibridasi sangat memungkinkan untuk diikuti

karena modelnya tersusun dari sebuah standar “kebagusan”. Idiom ini jelas identik dengan “kemajuan” yang ditawarkan oleh developmentalisme. Persoalannya, jika hibridasi adalah nilai atau norma, sangat terbuka jalan kompromi dengan developmentalisme, akan tetapi klaim poskolonial mengartikan hibridasi adalah integrasi. Eksistensi seseorang yang akan hilang karena keinginan untuk menjadi “liyan” sudah mendekonstruksi eksistensi awal sehingga tidak ada lagi sesuatu yang “asli”.

Studi developmentalisme pada era 1990-an sebenarnya telah mengalami krisis kepercayaan. Hal tersebut disebabkan karena: Pertama, banyak orang frustrasi melihat kesenjangan antara kesuksesan transformasi di segala bidang dengan sulitnya memelihara kepercayaan dari kehidupan mayoritas termarginal di arena global. Kedua, ada anggapan bahwa pembangunan yang dijalankan di dunia ketiga telah berada di titik impas karena tidak ada hasil yang memadai secara menyeluruh (Leys 1996). Ketiga, meminjam perspektif agak radikal yang dikemukakan oleh Escobar (1995) bahwa pembangunan tidak lebih dari sekadar proyek neokolonialisme dalam melayani kekuasaan ekonomi dan politik dengan dominasi. Proyek poskolonialisme Edward Said misalnya, langsung menawarkan oksidentalisme untuk melawan orientalisme. Terdapat kesan bahwa hal tersebut pantas dicurigai sebagai “*neo-modernity*” karena melawan obyek dengan cara yang sama dipakai oleh obyek.

Inspirasi dari krisis kepercayaan yang dialamatkan pada developmentalisme, secara fundamental mendorong munculnya kritik. Spivak (1990:96) dalam argumentasinya menekankan pada upaya untuk menakar ulang hubungan antara negara pertama dan ketiga melalui penilaian Marxis atas globalisasi modal dan pembagian kerja internasional. Menurutnya, pemikiran Marxis memprakarsai kesadaran baru yang berguna sekaligus meyerukan pada kelas pekerja bahwa mereka tengah memproduksi komoditas dari pemodal melalui kekuatan pekerja sebagai sumber utamanya. Premis ini, jika dikonversikan pada model pembangunan negara dunia ketiga sepadan dengan teorisasi kelompok neo-marxis bahwa negara dunia ketiga yang memproduksi kemakmuran bagi dunia pertama. Analisis poskolonial menambahkan adalah sangat mungkin negara dunia ketiga juga memainkan peran sebagai representasi kultural dari dunia pertama karena bermacam ikon, nilai dan semangat mengalami manipulasi.

Saya mengajukan argumentasi penolakan poskolonial atas developmentalisme dengan menarik simpulan dari Spivak karena dia banyak menyentuh aspek yang lebih luas daripada sekadar romantisme ketidaksetujuan terhadap produk wacana barat. Struktur imperialisme, kata Spivak mendirikan universalitas bagi narasi atas moda produksi. Pendapat ini sempat dibantah oleh Ahmad (1995) yang melihat munculnya pemikiran kritis di wilayah bekas koloni yang meyakini bahwa semua sejarah adalah kontestasi antara berbagai narasi yang berbeda sehingga imperialisme sendiri mendapatkan gambarannya bukan dalam hubungan universalisasi moda kapitalisme tetapi pada terma narrative dari moda tersebut. Narasi yang dibangun oleh Spivak tentang moda produksi merupakan tampilan reguler dari perspektifnya yang lain, mengenai subaltern.

Terdapat jarak antara narasi moda produksi dengan kondisi dimana kapitalisme atau imperialisme mengakui bentuk dari pembagian kerja internasional. Misalnya, perbedaan antara kelas pekerja dan petani dipandang sebagai bagian dari korban pembagian kerja yang paradigmatis yang diwariskan oleh kolonialisme. Pewarisan ini berjalan bersama perubahan sosial budaya dan dinamika ekonomi ketika negara bekas koloni mulai merdeka. Mereka

tetap menggunakan sistem yang sama dengan apa yang mereka pelajari dari sistem kolonial. Sebuah universalisasi bisa dicapai dengan cara apapun termasuk penerimaan dengan sadar bahwa sistem itulah yang paling mungkin untuk digerakkan. Di Bangladesh misalnya, terdapat gerakan radikal "prabartana" yang mengurus masalah industri kecil masyarakat asli dengan memutar modal yang didapatkan dari pemerintah dan iuran swadaya. Gerakan ini bisa tumbuh besar dan menguasai sektor industri hilir dan hulu dalam skala kecil-menengah yang dikelola dengan manajemen lokal. Spivak melihat gerakan tersebut tidak kebal dari sindrom *developmentalisme*. Dia menyela, bahwa rapuhnya gerakan tersebut disebabkan oleh investasi asing yang menyusup lewat pintu industri garmen internasional. "Prabartana tidak lagi menjadi gerakan kolektif karena dia mendapatkan juga subsidi dalam rangka membangun kapasitasnya sehingga kita bisa mengenalinya kini, dia hanyalah seorang artis" (Spivak, 2001).

Dari gambaran tersebut muncul konsepsi "*epistemic violence*", yang ditujukan pada tindakan menguasai dengan kekerasan pengetahuan. Kegagalan institusi lokal lebih banyak disebabkan oleh rendahnya posisi tawar dalam ilmu pengetahuan karena itu dunia ketiga bisa dengan mudah ditaklukkan dan mengalami kekerasan. Misalnya bisa dilihat juga pada konsepsi *good governance* yang diwartakan oleh lembaga-lembaga dimana negara-negara dunia ketiga mengambilnya sebagai hal baru yang menjanjikan adanya perubahan pola, struktur dan orientasi pemerintahan. Janji efektifitas, efisiensi dan ketepatan tujuan pemerintah membuat satu definisi tunggal akan model pemerintahan yang baik yaitu ramah pasar yang berarti menuntut pengelolaan seperti perusahaan. Meskipun konsep ini perlu diuji lebih jauh keberlangsungannya dan dampak yang harus dikaji lebih mendalam, konsepsi *good governance* nyatanya belum mendapatkan tantangan yang argumentatif kecuali hanya beberapa pihak yang memberikan opini menolak dengan alasan yang serba normatif dan tidak bersifat operasional serta realistik.

Ada kesulitan ketika mengkonversi batasan yang dimunculkan oleh Spivak mengenai hubungan antar wacana dalam rangka mencurigai adanya dominasi sistemik yang dilakukan oleh aktor dunia pertama. Nietzsche dan Foucault menyitir keberadaan "*originary*" dan "*spectral*" yang dipakai untuk menunjukkan pergerakan modal dari konjungtur sejarah yang berbeda-beda. Ruang lingkup "*originary*" membangkitkan kuasa untuk menyuplai kehendaknya mempertahankan diri dengan segenap keterikatan dengan asal muasal yang pernah diketahui. Negara poskolonial tidak mengetahui siapa dirinya dan terpaksa meminta justifikasi barat untuk menyebut dan menamai diri mereka sendiri (Hussain, 2003: 253; Hussain in Young and Braziel, 2006: 128-130). Istilah "*spectral*" mirip dengan "*fantasma*", atau "*hantu*" pada kondisi yang tidak nyata tetapi keberadaannya dirasakan begitu nyata. Pertanyaan "*siapa yang menjajah*"? Atau "*apa yang dijajah*"? Selalu ditujukan pada institusi yang melakukan aneksasi wilayah dan bertempat dalam wilayah tertentu. Tetapi jika "*bagaimana kolonialisme bekerja*?" timbunan emas dan perdagangan hasil bumi misalnya, tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebenarnya ada narasi yang lebih hebat dari prosesi material tersebut.

Derrida, mendamaikan kedua formulasi ini dengan terma "*spectro-capitalism*" yang berbeda dengan artian harfiah ketika dia menulis "*specters of Marx*" yang berarti memang ada hantu yang bernama Marx, yang mempunyai wujud semangat revolusioner dalam gerakan-gerakan Marxis. Terma "*spectro-capitalism*" dibaca menyambung menjadi identifikasi atas kapitalisme yang mempunyai organ, gerakan, semangat dan orientasi tetapi wujudnya bisa

dalam institusi atau gagasan. Formulasi "*spectro-capitalism*" menjanjikan pembacaan yang lebih ideal sekaligus memberikan jawaban bahwa notasi kapitalisme mempunyai kapasitas untuk bergerak dengan wacana yang dikembangkannya sehingga begitu digdaya tanpa tantangan yang berarti. Tampaknya Derrida sukses menjadikan konsep "*originary*" Foucault sebagai identifikasi yang lebih tajam untuk menjelaskan kapitalisme. Spivak juga mewartakan pesan yang secara substansial sama-sama mencita-citakan konsepsi awal sebelum kolonialisme membungkus narasi pribumi dengan narasinya.

Negara dalam pandangan postkol hanya instrumen kecil dimana *sub-altern* mengadu untung dalam kompetisi yang ketat. Mereka memanfaatkan jaringan dengan kurang lebih efektif bersama dengan posisi yang diterimakan mereka oleh kolonialisme. Spivak menyebut "*sub-altern*" sebagai kategorisasi dari "*native informant*" bagi dirinya sendiri. Semula saya terperangah, tetapi cepat-cepat menemukan ada sesuatu yang ganjil dari logika yang diformalisasikan oleh teorisasi Marx atas moda produksi karena subaltern tidak mempunyai atau mendapatkan akses untuk mengaktifkan moda produksinya ketika negara dalam posisi yang berada diatas mereka sebagai kepanjangan tangan dari sistem kolonialis. Disini tidak ada pembebasan, tidak mengenal reposisi dan redefinisi peran dan status sosial, disini tetap ada abdi yang bernama mayoritas dan penguasa yang bernama imperial.

Jika akar analisisnya berawal dari macetnya kesadaran akan fungsi negara, maka secara beruntun kesalahan serupa bisa ditimpakan pada Gramsci, Althouser dan para pengikutnya. Setidaknya ada tiga kesalahan yaitu. Pertama, Gramsci mengasumsikan hegemoni sebagai hasil yang lebih baik dari koersi dan tulang punggung utamanya adalah intelektual. Sementara Althouser melihat ideologi sebagai persoalan yang mendominasi terjadinya penguasaan alat produksi sesuai sifat-sifatnya yang mengikat kesadaran. Baik intelektual, ideologi dan hegemoni masih bersandar gerak negara dan itu menjadikannya terbatas. Kedua, konsep teori dependensi mempunyai asumsi oposisi biner karena ada pusat dan pinggiran dalam relasi yang senjang. Ketiga, teorisasi kaum neomarxis cenderung menetapkan kausalitas sebagai hukum yang bergerak secara inheren dimana kelompok pemodal selalu memenangkan pertandingan. Tetapi dalam prosesnya tidak diikuti dengan penjelasan bagaimana dengan "*mayoritas yang diam*" meski mereka mempunyai kategorisasi yang tidak semutlak yang dipilhkan oleh pendukung neomarxis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Keempat

Penjelasan dari klaim poskol yang mengusung agenda strategis untuk melakukan reposisi atas relasi dalam proses produksi. Mengikuti Foucault, teori poskol tidak membatasi model kekuasaan dari konsepsi kekuasaan tradisional mengenai regulasi negara atau sistem umum yang dominatif yang dilakukan oleh kelompok terhadap lembaga sosial yang ada. Mereka menggambarkan kekuasaan sebagai jaringan yang kompleks dan saling sinambung antar satu dengan lainnya, secara teknis rapi dan beroperasi melalui rezim kebenaran dan kenormalan. Keyakinan akan bentuk kekuasaan yang memanfaatkan kebenaran dan kenormalan untuk bekerja menjadi menarik untuk dikembangkan menjadi perhatian khusus terhadap sistem wacana.

Tidak dapat disangsikan lagi, keberadaan "*wacana*" sebagai ujung tombak proses hegemonisasi telah membuat kelemahan-kelemahan mendasar negara dunia ketiga tampak terlalu dibesar-besarkan. Sejatinya, meski gagal untuk melakukan asimilasi pengetahuan

dengan cara pembelajaran melalui sekolah, transfer teknologi dan komunikasi antara delegasi, perlu dilihat faktor yang berada dibalik kegagalan tersebut. Strategi pertama yang ditawarkan oleh poskol adalah pendekatan estetis untuk memahami simbolisasi kegagalan dunia ketiga terhadap budayanya. Strategi kedua adalah resistensi dan subversi yang muncul dari tipe kekuasaan yang alamiah. Keduanya merupakan manifestasi bukan hanya ketika subyek personal menginginkan kekuasaan dan membangun jaringan sebagai salah satu cara membuat intrik politik tetapi ketika mereka menyadari pentingnya kekuasaan. Subyek yang sadar akan pentingnya kekuasaan. Ini menjadi sasaran bagi sebagian besar orang ketika dirinya merasakan ada penindasan dan keterbatasan sementara yang diketahui hanyalah memang segala keterbatasan tersebut telah ditentukan (*given*).

Dengan demikian konsolidasi yang mereka lakukan lantas mengabaikan identitas mereka dalam parameter yang lain. Sekalipun terdapat dominasi, dengan penguasaan segala sumber daya yang dimiliki oleh negara dunia ketiga tetapi masih ada kemungkinan lain untuk melihat bahwa dominasi sebenarnya merupakan bentuk yang lebih spesifik dari relasi kuasa yang bekerja dalam skala mikro dan makro. Tentu saja strategi kedua akan dialamatkan pada resistensi atas penguasaan fisik lantas meluas sampai ke tepian psikis. Narasi kolonialisme dan imperialisme bukan hanya merupakan desain dengan gambaran yang salah dimana terdapat praktek yang diskriminatif. Narasi itu dibangun diatas ambivalensi teks yang proyektif dan introjektif, dengan strategi metaforis dan metonimiesis, *displacement*, kesalahan, agresivitas dan menutup diri dengan topeng ketika muncul kepermukaan sebagai hantu pengetahuan (Bhabha, 1986: 169). Rezim wacana cukup menyulitkan untuk dibaca dengan jernih karena melibatkan banyak aksentuasi. Dalam sebuah kondisi, wacana bisa muncul dan dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melakukan pembungkaman dan pemaksaan kognitif untuk mengakui sebuah kebenaran. Strategi ketiga adalah praktek dekonstruksi tekstual terhadap literatur, karya sastra, dokumentasi sejarah dimana harapan terbesar bukan hanya menjelaskan kecurigaan atas terjadinya penguasaan melalui wacana tetapi pembongkaran tekstual diyakini mampu menerangkan untuk apa wacana tersebut digunakan dan kemana dia diarahkan.

Negara dan sistem internasional merupakan ranah yang berbeda. Pun akan dirasakan oleh negara dunia ketiga ketika berbicara mengenai batasan pengelolaan sumber daya dan segenap regulasi yang dibuat untuk mendistribusikan kemakmuran. Strategi keempat akan diambil dari unsur pemberdayaan dan representasi. Kedua unsur ini belum terjabarkan karena konjungtur sejarah Marxian menolak untuk menyebut pemberdayaan dalam konotasi positif. Pihak yang diberdayakan musti menuntut ketidakmandirian obyek dan kekuasaan subyek untuk membentuk dan mencorot-coreti narasi obyek. Masih ada logika oposisi antara subyek dan obyek dalam paradigma developmentalisme. Strategi keempat dirumuskan sebagai penetapan modalitas lokal sebagai sarana untuk menciptakan kondisi "phresia", sebuah kebebasan untuk membicarakan diri, menjustifikasi diri dan berbuat sesuai kepentingan dan otonomisasi diri. Strategi ini diwartakan oleh Foucault tetapi perlu diadaptasikan bahwa strategi keempat poskol dalam penolakan terhadap developmentalisme.

### **Penolakan Terhadap Developmentalisme**

Penolakan poskol terhadap developmentalisme bisa dijelaskan dalam empat sektor sebagai unit analisis yaitu sistem perdagangan internasional, skema pendistribusi modal,



peranan institusi global, keberadaan negara dan masyarakatnya. Para teoritis developmentalisme mengklaim bahwa sejak konferensi Bretton Woods, dunia telah berubah. Setidaknya satu hal yang utama adalah sistem ekonomi global yang tetap bertahan adalah liberalisme. Negara dunia ketiga juga hanyut dalam efek samping dengan mengalirnya dana-dana internasional untuk mendukung pembangunan. Pada beberapa dekade terakhir, dana-dana tersebut terkonsentrasi pada pembangunan negara yang mempunyai ekonomi lemah dan membuka diri pada penerapan sistem ekonomi global. Ulasan mengenai sistem perdagangan internasional tidak bisa dilepaskan dari penguasa ekonomi global yaitu TNC-MNC sebagai aktor utama. Kritik poskol terletak pada implementasi kebijakan dari dunia ketiga selalu mendapatkan pembenaran dari negara dunia pertama. Meskipun dalam konteks ini, terdapat pengakuan atas diferensiasi dunia pertama, kedua, dan ketiga tetapi alur yang dibangun oleh rezim global tetap menekankan adanya negara inti-pinggiran.

Sistem perdagangan internasional seharusnya berpegang pada prinsip yang tidak eksploitatif. Maksudnya setiap negara mempunyai kapasitas yang tidak sama tetapi tidak bisa ditekan untuk menyetujui setiap klausul yang diajukan oleh pemilik modal agar menetapkan perencanaan dan tujuan pembangunan sesuai dengan keinginan mereka. Dari sini kemudian standar kemajuan diberlakukan sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk menjadi pihak yang paling bisa menarik investasi pemodal sebanyak-banyaknya. Sistem perdagangan internasional perlu dimodifikasi bukan hanya membagi komposisi wilayah produksi dengan berbagai macam pemilahan keahlian dan teknologi. Proses produksi yang dijalankan di negara berkembang menyuplai keuntungan pada pemilik modal karena disaat yang sama perdagangan tetap dikendalikan oleh pemodal dan negara berkembang menjadi konsumen yang besar. Sistem perdagangan internasional dengan segala macam regulasi yang dibuat oleh rezim global seakan-akan menjadi pihak yang memberi makan dan malaikat penyelamat negara berkembang dari kelaparan.

Hasil produksi ternyata tidak mempunyai sistem distribusi yang merata. Pasar modal internasional mengalami apa yang sering disebut *swift evolution* yang membuat lemahnya kontrol negara atas perilaku institusi finansial internasional. Ini menjadikan negara dunia berkembang yang menjadi obyeknya berada dalam posisi yang sulit. Developmentalisme sendiri harus dipahami mulai beranjak dari munculnya negara merdeka sebelum mendirikan sistem pertukaran ekonomi luar negeri dan ekspansi masif dari pergerakan modal internasional. Jika disimak, pertumbuhan ekonomi dunia dari tahun 1950-1990 sebesar 2,75 persen pertahun. Sampai tahun 1980 an terdapat 350 perusahaan transnasional (TNC) yang menguasai 40 persen aset perdagangan global (Oman, 1993). Cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dunia dipusatkan pada sentra-sentra produksi baru di negara berkembang dimana mereka membutuhkan segala jenis barang dengan harga yang sedikit lebih mahal dengan kualitas yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kelebihan 60 persen penguasaan aset perdagangan menjadi milik negara maju. Persoalan distribusi yang tidak merata menyebabkan ketidakseimbangan tingkat kemakmuran dan ketersediaan kelayakan atas kehidupan yang memadai.

Institusi global bertindak sebagai agen kolonialisme baru. Infiltrasi mereka paling jelas dirasakan dalam perumusan strategi pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada usaha untuk mengejar pertumbuhan produksi pertanian dan promosi usahawan kecil-menengah dengan intensifikasi tenaga kerja (Helleiner, 1992; 1994). Dimanapun tempat di dunia ketiga hampir dipastikan mendapatkan perlakuan dan resep yang sama. Poskol menolak diktum

pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural di dunia ketiga tergantung pada produktivitas buruh. Institusi global mencakup institusi kerjasama ekonomi multilateral seperti APEC, institusi supranasional seperti IMF dan World Bank memainkan peran dalam penentuan tarif perdagangan global, otorisasi moneter sampai bagaimana kebijakan harus diambil.

Optimalisasi peran institusi global mendapatkan pengaruhnya ketika pada tahun 80-an, paket yang ditawarkan oleh negara pertama adalah reformasi kebijakan ekonomi bagi masyarakat yang terbuka pada pasar dan dalam prosesnya diikuti oleh mengalirnya modal, barang konsumsi dan informasi (Thurow, 1996; Altimir, 1997). Pembukaan pasar jelas didanai oleh kekuatan besar yang membawa angin revolusi komunikasi dan informasi, perubahan dalam lanskap geopolitik dan sistem produksi berbasis pengetahuan. Dalam tahun 1990, kesejahteraan global di setiap wilayah mampu dihitung dengan ukuran pendapatan perkapita riil yang ternyata lebih rendah 15 persen dari tahun 1980 an dan angka kemiskinan semakin bertambah daripada 20 tahun yang lalu. Isu yang paling dirasakan adalah transnasionalisasi ekonomi dan politik. Dimensi ini mempunyai makna yang kompleks. Dalam struktur geopolitik, tentu transnasional adalah fenomena unidimensional dan developmentalisme lebih dari sekadar efek globalisasi (Morales-Gómez & Torres, 1995).

Wacana kemakmuran, reformasi ekonomi, globalisasi dan sebagainya benar-benar memukau dan menjadi kebenaran baru dan selalu menghimpun dimensi ke-baru-an dalam propagandanya. Pada dekade yang paling mutakhir, developmentalisme mewacanakan perlunya pembangunan manusia. Implikasinya pada pemuasan kebutuhan dasar, perbaikan pelayanan sosial dan pencegahan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh kekerasan, kemiskinan mutlak dan efek negatif urbanisasi. Pengalaman sosial di masing-masing negara poskol menunjukkan adanya keseriusan untuk mengadaptasi teori demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mereka mempercayai bahwa pemerintahan yang representatif adalah ciri dari kemajuan sosial dan kemudian dijadikan ukuran dalam kemajuan ekonomi. Hal ini menjadi pangkal persoalan keberadaan negara karena apa yang dipercayai justru menghasilkan kesenjangan antara pengalaman historis masyarakat dengan harapan yang hendak dicapai. Sebuah ironi besar ketika masa depan yang terbuka ternyata tidak mampu dikendalikan oleh masa lampau (Luhmann 1982:281). Kelompok administrator benar-benar dibentuk demi kebutuhan operasional pemerintahan dan untuk mengendalikan hubungan sosial sampai pada kondisi institusionalisasi "*behavioral expectations*" (Luhmann 1990). Kelompok administrator tidak steril dari kontaminasi kolonialisme. Mereka tidak akan membiarkan negara untuk menempuhi tahap kedua dari pembangunan kapasitas negara dalam mengatur hubungan sosial yang disebut oleh Foucault sebagai "*the discovery of society*", negara yang berkarakteristik dari inspirasi kekuatan *civil society* dan menegaskan keberadaannya sebagai jaringan hubungan sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak mempunyai pilihan lain untuk berkonfrontasi dengan realitas pasar, *civil society* dan warga negara yang mempunyai kepadatan logika internal sendiri dan mekanisme intrinsik untuk mengatur dirinya sendiri (Rose, 1996: 43).

Pertarungan untuk memperebutkan negara antara rezim global dengan masyarakat dalam lingkup sosial politik negara sama-sama bertujuan untuk mendirikan tatanan sosial yang melayani kepentingan mereka. Misalnya, menurut T.S. Marshall (1965), hak warganegara di Inggris tumbuh dari hak sipil seperti kebebasan seseorang untuk bicara, memiliki hak milik pribadi. Kemudian pada abad 19 berkembang hak politik dalam bentuk

partisipasi politik dan hak untuk memilih. Pada abad 20 hak sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan. Negara dunia ketiga juga mempunyai gambaran yang sama dan kalimat sakti seperti kebebasan bicara sampai pencapaian kesejahteraan benar-benar begitu dipuja sehingga tidak jarang terjadi konfrontasi dan perpecahan didalam negara. Dalam tradisi kolonial, mengatur negeri koloni dengan landasan eksploitasi ekonomi sementara mereka menginginkan membangun orientasi metropolis dalam rangka membentuk negara yang "plunderer", bisa merampok (Crowder, 1968; Bathily, 1994; Zeleza 1994). Dalam menjalankan misinya, kolonialisme banyak mendapatkan dukungan dari kelompok kepentingan yang membantu menerjemahkan dan definisi setiap misi utama pemerintahan disamping itu institusi lain seperti militer dan administrator serta kelompok perdagangan. Bentuk agensi kolonial inilah yang masih menyertai perilaku negara sehingga kritik poskol atas keberadaan negara adalah substansial, ingin menjadikan negara sebagai wadah pencarian akar masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Hubungan antara teori poskolonial dan developmentalisme bukanlah hubungan yang berjalan linier dimana masing-masing membuka dialog. Teori poskolonial menolak paradigma dan praktik yang dibangun dan diimplementasikan oleh developmentalisme. Penolakan ini berdasarkan pada kenyataan bahwa apa yang ditawarkan oleh developmentalisme identik dengan kolonisasi baru dalam aspek ekonomi dan meluas dalam aspek sosial, politik dan budaya. Pada akhirnya berakibat pada dislokalisasi yang bisa mencederai keinginan dan otonomisasi dari negara-negara yang distigmatisasi sebagai negara berkembang, dunia ketiga. Diantara berbagai strategi yang ditawarkan oleh teori postkol, strategi keempat yaitu penolakan pada developmentalisme mementahkan struktur kekuasaan pemodal yang bermain melalui hegemoni sistem perdagangan internasional dan skema distribusi modal yang tidak merata. Ruang yang bernama negara juga direduksi sebatas alat pemidah otoritas tanpa melakukan sesuatu yang berguna dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakatnya secara luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1995). *The Politics of Literary Postcoloniality. Race and Class* (36) 3.
- Alexander, M. J. & Mohanty, C. T. (1997). *Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures*. London: Routledge.
- Altimir, O. (1997). Desigualdad, empleo y pobreza en América Latina: efectos del ajuste y del Cambio en el Estilo de desarrollo. *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, 37(145), 3-30.
- Bathily, A. (1994). *The West African State in Historical Perspective*. In Osaghae, E., ed., *Between state and civil society in Africa*. Council for the Development of Economic and Social Research in Africa, Dakar, Senegal.
- Bhabha, H. K. (1986). *Remembering Fanon. Introduction to the English Edition of Black Skin White Mask*. London: Pluto Press.
- Bhabha, H. K. (2003). Democracy De-realized. *Diogenes*, 50(1), 27-35. doi:10.1177/039219210305000104.
- Bhabha, H. K. (1990). *Nation and Narration*. London: Routledge.
- Bhabha, H. K. (1994). *Introduction: Locations of Culture*. London: Routledge.

- Bhattacharya, R. (2019). *Developmentalism as Strategy*. India: SAGE Studies.
- Chachage, C. S. & Chachage, C. S. L. (2004). Nyerere: Nationalism and Post-Colonial Developmnetalism. *African Sociological Review*, 8(2), 158-179. DOI: 10.4314/asr.v8i2.23256.
- Chakrabarty, D. (1992). Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts?. *Representations*, (37), 1-26. doi:10.2307/2928652.
- Crowder, M. (1968). *West Africa Under Colonial Rule*. London: Hutchinson.
- Dirlik, A. (1994). The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism. *Critical Inquiry*, 20(2), 328-356.
- Dirlik, A. (2012). Developmentalism. *Interventions*, 16(1), 30-48. doi:10.1080/1369801x.2012.735807.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Amerika Serikat: Princeton University Press.
- Gadgil, M., & Guha, R. (1994). Ecological Conflicts and the Environmental Movement in India. *Development and Change*, 25(1), 101-136. doi:10.1111/j.1467-7660.1994.tb00511.x.
- Guha, R. (2010). Motivators and Hygiene Factors of Generation X and Generation Y-The Test of Two-Factor Theory. *The XIMB Journal of Management*, 7(2), 121-132.
- Helleiner, E. (1992). Structural Adjustment and Long-term Development in SubSaharan Africa. *Alternative Development Strategies in SubSaharan Africa*, 48-78. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-12255-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-349-12255-4_2).
- Helleiner, E. (1994). *States and the Re-emergence of Global Finance*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hussain, N. (2003). *The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law*. Michigan, US: University of Michigan Press.
- Howe, Brendan M. and Seo Hyun Rachele Park. (2015). Laos: The Dangers of Developmentalism?. *Southeast Asian Affairs*, 165-185. Project MUSE [muse.jhu.edu/article/583048](http://muse.jhu.edu/article/583048).
- Jayaweera, S. (1999). *Education and Gender Equality in Asia*. In S. Erskine & M. Wilson (Eds.) *Gender Issues in International Education: Beyond Policy and Practice*. New York: Falmer Press.
- Lande, C. H. (2002). Political Clientelism, Developmentalism and Postcolonial Theory. *Philippine Political Science Journal*, 23(46), 119-128. doi:10.1080/01154451.2002.9754237.
- Lee, E. W. Y. (2005). The Politics of Welfare Developmentalism in Hong Kong. *Transforming the Developmental Welfare State in East Asia*, 118-139. DOI: 10.1057/9780230523661\_6.
- Leys, C. (1996). *The Rise and Fall of Development Theory*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Luhmann, N. (1982). *The Differentiation of Society*. New York: Columbia University Press.
- Luhmann, N. (1990). *Essays on Self-Reference*. New York: Columbia University Press.
- Marshall, T. S. (1965). *Citizenship and Social Class*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Mohanty, C. T. (1991). *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*. In *Third World Women and the Politics of Feminism*. Ed. C. T. Mohanty, A. Russo and L.Torres. 51-81. Bloomington: Indiana University Press.

- Morales-Gomez, D. & Torres, M. (1995). *Social Policy in A Global Society: Parallels and Lessons from the Canada–Latin America Experience*. Ottawa: International Development Research Center.
- Oman, C. (1993). Globalization and Regionalization in the 1980s and 1990s. *Development & International Cooperation*, 9(16): 51-6.
- Pereira, L. C. B. (2016). Reflecting on new developmentalism and classical developmentalism. *Review of Keynesian Economics*, 4(3), 331-352. doi:10.4337/roke.2016.03.07.
- Rajan, G. and Mohanram, R. (1995). *Postcolonial Discourse and Changing Cultural Contexts: Theory and Criticism*. Westport, CT: Greenwood Press
- Rizvi, F., & Walsh, L. (1998). Difference, globalisation and the internationalisation of curriculum. *The Australian Universities' Review*, 41(2), 7-11. <https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.200001429>.
- Rose, N. (1996). *Governing "Advanced" Liberal Democracies*. in Barry, A.; Osborne, T.; Rose, N., Ed., *Foucault And Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government*. Chicago: University of Chicago Press.
- Said, E. (1983). 'Traveling Theory.' *The World, the Text, and the Critic*. Cambridge, MA: Harvard UP.
- Skinner, K. (2011). Who Knew the Minds of the People? Specialist Knowledge and Developmentalist Authoritarianism in Postcolonial Ghana. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 39(2), 297-323. doi:10.1080/03086534.2011.568756.
- Sharp, J. & Briggs, J. (2006). Postcolonialism and development: new dialogues? *Geographical Journal*, 172(1), 6-9. doi:10.1111/j.1475-4959.2006.00181.x.
- Slemon, S. (1990). Unsettling the Empire: Resistance theory for the second world. *World Literature Written in English*, 30(2), 30-41. doi:10.1080/17449859008589130.
- Spivak, G. C. & Harasym, S. (1990). *The Post-Colonial Critic Interviews, Strategies, Dialogues*. London: Routledge.
- Spivak, G. C. A (1999). *Critique of Postcolonial Reason: Toward A History of the Vanishing Present*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sylvester, C. (1999). Development studies and postcolonial studies: Disparate tales of the "Third World." *Third World Quarterly*, 20(4), 703-721. doi:10.1080/01436599913514.
- Thurow, L. C. (1996). *The Future of Capitalism: How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*. New York: William Morrow.
- Young, J. A. & Braziel, J. E. (2006). *Race and the Foundations of Knowledge: Cultural Amnesia in the Academy*. US: Urbana, University of Illinois Press.
- Zezeza, T. 1994. *A Modern Economic History of Africa, Vol. I: The Nineteenth Century*. Council for the Development of Economic and Social Research in Africa, Dakar, Senegal.